

**PERAN PARTAI DEMOKRASI I INDONESIA PERJUANGAN DALAM  
MEMENANGKAN PASANGAN GANJAR PRANOWO - HERU SUDJATMOKO  
PADA PILGUB JATENG 2013.**

Oleh : Drs. Susilo Utomo, M. Si

***Abstract***

*This study intends investigate the role of PDI in winning pair Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko in Central Java Governor Election 2013. The research method uses a qualitative approach, in-depth interviews with key figures Success Team Couple Ganjar- Heru.*

*The results show that the role of PDI was very decisive in determining the victory of the Central Java Governor Election 2013. Political Role of the PDI-P that took the role as political recruiter and as an engine pollster or mass mobilization.*

*Keywords : Political Partai, Political Recruitment and Political Vote Seeker, The Local Election.*

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung (Pemilukada) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 merupakan mekanisme demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan pasangan kepala daerah yang dikehendakinya secara langsung. Melalui Pemilukada pasangan calon kepala daerah kemudian dituntut untuk lebih dekat dengan rakyat, lebih memahami persoalan daerah setempat yang kemudian diharapkan dapat menjadi basis penentuan kebijakan yang lebih baik sehingga bermuara pada pencapaian kesejahteraan rakyat di daerah yang lebih efektif.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan Pemilukada memberikan ketentuan tentang syarat pencalonan pasangan kepala daerah dimana pasangan calon kepala daerah dapat dilakukan melalui jalur perseorangan maupun diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam hal pasangan calon kepala daerah melalui jalur perseorangan, hal tersebut baru berlangsung sejak direvisinya UU No 32 Tahun 2004 menjadi UU No 12 Tahun 2008. Dalam pasal 59 UU No 12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah :

1. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan syarat memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
2. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang dbuktikan dengan surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tandan penduduk dengan jumlah sebagaimana dalam tabel 1.1 :

**Tabel 1.1**  
**Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan**

Daerah	Jumlah Penduduk	Dukungan Minimal
Provinsi	Sampai Dengan 2 juta	6,5 %
	Lebih dari 2 juta sampai 6 juta	5 %
	Lebih dari 6 juta sampai 12 juta	4 %
	Lebih dari 12 juta	3 %
Kab/Kota	Sampai dengan 250 ribu	6,5%
	Lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu	5 %
	Lebih dari 500 ribu sampai 1 juta	4 %
	Lebih dari 1 juta	3 %

Sumber : UU No 12 Tahun 2008

Disamping dukungan minimal sebagaimana tabel di atas, persyaratan tersebut harus pula memenuhi persyaratan persebaran dimana untuk tingkat provinsi tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota diprovinsi tersebut. Sedangkan untuk kabupaten/kota tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota tersebut.

Kiprah pasangan calon kepala daerah melalui jalur perseorangan menunjukkan fakta yang kurang mampu bersaing dengan pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tidak semua pemilukada baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi diikuti oleh pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Demikian halnya dengan kemenangan yang diraih oleh pasangan calon kepala daerah melalui jalur perseorangan. Hanya sedikit pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan yang mampu meraih kemenangan.

Di Jawa Tengah dari 28 Pemilukada yang digelar sepanjang 2010-2012 hanya 10 kabupaten/kota yang diikuti oleh pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan dengan 16 pasangan. Namun demikian tidak ada satu pasangan pun yang mampu meraih kemenangan. Bahkan sebagian besar pasangan kepala daerah tersebut hanya memperoleh suara di bawah sepuluh persen. Pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan yang memperoleh persentase suara tertinggi adalah pasangan Budhi Sarwono-Kusumo Winahyu sebesar 34,19% dalam Pemilukada Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 sebagaimana nampak dalam tabel 1.2. :

**Tabel 1.2.**  
**Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilukada di Jawa Tengah 2010-2012**

No	Nama Pasangan	Pemilukada	Persentase Perolehan Suara
1	Supriyadi- Abdul Kholiq	Kota Pekalongan	6,11 %
2	H Supriyono-Nasikhin	Kab Kendal	4,28%
3	Drs.Mulyono-Imam Baihaqi	Kab Rembang	4,17%
4	Ir. H. Yahya Amin-H N Suryana	Kab Rembang	17,71%
5	Drs. Koentjoro-Rahajeng E R	Kota Magelang	5,27%
6	Drs. Legiman M-Drs. Hartono	Kab Purworejo	9,76%
7	Drs. Ashal Badri-HM Fatkhur R	Kab Purworejo	2,27%
8	Angko Setiyarsa- H Sudiyo	Kab Purworejo	8,35%
9	Sumardiyo-H Muchson	Kab Wonosobo	2,48%
10	Drs. H Sularno-H Kusharjon	Kab Sragen	0,97%
11	Danang Wijaya-Sumiyarno	Kab Sragen	1,94%
12	H Slamet Warsito-Sri Mulyani	Kab Pati	16,39%
13	Sri Merditomo-Karsidi	Kab Pati	16,47%
14	Sri Susahid-Hasan	Kab Pati	0,72%
15	Budhi Sarwono-Kusumo W	Kab Banjarnegara	34,19%
16	Kol Imam Djahuri-Cashuri	Kab Pekalongan	1,87%

Sumber : KPU Jawa Tengah,2012

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 16 pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan hanya empat pasangan yang berhasil meraih persentase di atas sepuluh persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan tidak mampu secara efektif menarik suara pemilih, sebaliknya pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik mampu menarik suara pemilih.

Atas dasar fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa, partai politik tidak saja menjadi kendaraan pasangan calon kepala daerah dalam proses pencalonan semata namun juga mampu menjadi mesin politik yang cukup efektif dalam menarik suara pemilih.

Dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik merupakan sebuah keniscayaan dan merupakan institusi utama dalam melakukan fungsi-fungsi politik (Gabriel Almond, 1974, h. 45). Partai politik didefinisikan sebagai grup atau kelompok masyarakat yang menunjukkan ciri utama sebagai kelompok kepentingan yang tujuan utamanya mengarah pada penguasaan jabatan publik. Sedangkan Fungsi-fungsi politik, terdiri atas artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, recruitment politik dan komunikasi politik.

Dalam hal Pemilukada maka fungsi rekrutimen atau seleksi pemimpin yang dilakukan oleh partai politik menjadi sangat penting, mengingat partai politik merupakan “*kawah candra dimuka*“ bagi calon-calon kepala daerah Melalui partai politiklah calon pemimpin dididik, disiapkan sebagai kader partai untuk melaksanakan “platform dan ideology” partai.

Di Jawa Tengah dari semua pemilukada yang diselenggarakan sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 semua dimenangi oleh pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Jika melihat hasil pemilihan umum (Pemilu) legislatif sejak tahun 1999 hingga 2014 dapat disimpulkan bahwa Jawa Tengah merupakan daerah basis PDI Perjuangan. PDI Perjuangan selalu menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak dalam 4 Pemilu terakhir. Untuk Pemilu DPRD Jawa Tengah, pada tahun 1999 PDI Perjuangan mampu meraih 42,8 persen dari total suara sah, 29,8 persen di tahun 2004, dan 23 persen di tahun 2009 dan 27 % pada pemilu legislative 2014.

Demikian halnya untuk pemilu di tingkat DPRD Kabupaten/Kota. PDI Perjuangan merupakan partai yang mampu menguasai sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah PDI Perjuangan mampu menjadi pemenang di 33 Kabupaten/Kota dalam Pemilu 1999. PDI Perjuangan hanya kalah di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Jepara. Sedangkan pada Pemilu 2004, PDI Perjuangan mampu unggul di sepuluh kabupaten/kota dan pada Pemilu 2009 PDI Perjuangan mampu unggul di 23 kabupaten/kota.

Dari 28 Pemilukada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang diselenggarakan sepanjang 2010 hingga Februari 2013 tercatat PDI Perjuangan mampu meraih kemenangan di 13 kabupaten/kota, dimana 6 kabupaten/kota mampu diraih secara mandiri atau tanpa berkoalisi dengan partai lainnya dan 7 kabupaten/kota diraih dengan berkoalisi. Sedangkan di 15 kabupaten/kota PDI Perjuangan mengalami kekalahan dimana di 8 kabupaten/kota PDI Perjuangan mengusung pasangan calon kepala daerah secara mandiri dan di 7 kabupaten/kota diusung dengan berkoalisi sebagaimana nampak dalam tabel 1.3.

**Tabel 1.3.**  
**Capaian PDIP Dalam Pemilukada Kab/Kota Di Jawa Tengah 2010-2013**

	NO.	MENANG	NO.	KALAH
<b>DENGAN KOALISI PARTAI KOALISI</b>	1.	<b>Kab. Banjarnegara : 40,02%</b> (P. Golkar, PDIP, PPP, PKS, P. Gerindra, PKNU, P. Hanura, PBR, PPRN, P. Barnas).	1.	<b>Kab. Pekalongan : 37,01%</b> (PKB, PDIP).
		<b>Kab. Boyolali : 44,55%</b> (PDIP dan PKB).	2.	<b>Kab. Wonosobo : 17,57%</b> (PAN dan PDIP).
	2.	<b>Kab. Klaten : 64,23%</b> (PDIP, PKS, P. Demokrat).	3.	<b>Kota Pekalongan : 40,80%</b> (PAN, PPP, PDIP, PKB, P. Gerindra, P. Demokrat, PKNU).
	3.	<b>Kab. Semarang : 44,74%</b> (PDIP, P. Demokrat, PAN, P. Hanura).	4.	<b>Kota Salatiga : 5,67%</b> (PDIP, PAN, PDS, dan P. Golkar).
	4.	<b>Kota Magelang : 43,53%</b> (PDIP, PAN, dan PKS).	5.	<b>Kab. Wonogiri : 28,15%</b> (PDIP dan PKS).
	5.	<b>Kab. Purbalingga : 57,59%</b> (PDIP, PAN, PKS, dan PKB).	6.	<b>Kab Cilacap : 38,95%</b> (PDIP, Demokrat, PKB, PPP, PKS, Gerindra)
	6.	<b>Kab Banyumas : 44,5%</b> (PDIP, PPP)	5.	<b>Kab Jepara : 18,3%</b> (PDIP, PKB, PKNU)
			6.	
<b>TANPA KOALISI</b>	1.	<b>Kab. Pemalang : 46,52%</b>	1.	<b>Kab. Blora : 8,21%</b>
	2.	<b>Kab. Sukoharjo : 49,33%</b>	2.	<b>Kab. Demak : 3,27%</b>
	3.	<b>Kab. Kendal : 43,22%</b>	3.	<b>Kab. Grobogan : 40,44%</b>
	4.	<b>Kota Semarang : 34,28%</b>	4.	<b>Kab. Purworejo : 9,56%</b>
	5.	<b>Kota Surakarta : 90,09%</b>	5.	<b>Kab. Kebumen : 19,33%</b>
	6.	<b>Kab Brebes : 45,7%</b>	6.	<b>Kab. Pati : 22,11%</b>
			7.	<b>Kab. Sragen : 44,22%</b>
			8.	<b>Kab Batang : 22,7%</b>

Sumber : KPU Jateng 2013 setelah diolah

Dalam Pemilihan gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2013 PDI Perjuangan mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmiko. Ganjar Pranowo sebagai kader PDI Perjuangan merupakan figur yang mampu mengalahkan figur-figur lain yang mengikuti seleksi internal bakal calon gubernur yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan seperti: Rustriningsih, Don Mudono, Hadi Prabowo, Sunarna dan sejumlah figur lainnya. Munculnya pasangan tersebut sama dengan Pilgub yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Bali dimana PDI Perjuangan mungusung kader sebagai calon gubernur. Meskipun kemudian dari PDI Perjuangan mengalami kekalahan di Sumatera Utara dan Jawa Barat.

Munculnya pasangan tersebut juga dinilai sangat mengejutkan publik mengingat dalam survey-survey yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survey popularitas Ganjar Pranowo tertinggal jika dibandingkan dengan Rustriningsih ataupun Hadi Prabowo. Demikian halnya dengan tingkat elektabilitas personal yang dimiliki Ganjar Pranowo dimana masih kalah jika dibandingkan dengan Rustriningsih.. Namun, kenyataannya, pasangan Ganjar-

Heru (Gagah) memenangkan pemilihan gubernur Jawa-Tengah yang digelar pada hari Minggu Kliwon 26 Mei 2013.

Atas dasar itulah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran PDI Perjuangan sebagai mesin politik pasangan Gagah memenangkan pemilihan gubernur Jawa-Tengah 2013 pada tanggal 26 Mei yang lalu ?.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimanakah peran PDI Perjuangan Sebagai Mesin Politik Pemenangan Pasangan “Gagah” Pada Pemilihan Gubernur Jawa-Tengah 2013 ?.

### **Tinjauan Pustaka**

Dalam sistem demokrasi, posisi dan peran partai politik sangat strategis, sehingga keberadaan partai politik merupakan sebuah keniscayaan. Gabriel Almond (1974, h.45) mendefinisikan partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki fungsi-fungsi politik dan merupakan kelompok kepentingan yang memiliki tujuan utama untuk memperebutkan jabatan-jabatan publik.

Dalam memperebutkan jabatan-jabatan public tersebut partai politik sudah barang tentu memobilisasi massa untuk memperoleh dukungan suara, sehingga tujuan utamanya dapat terpenuhi. Untuk mencapai tujuan utama tersebut, partai politik memiliki paling kurang tiga orientasi politik, yaitu orientasi untuk memperoleh dukungan suara sebanyak-banyaknya, orientasi untuk menduduki jabatan public/ politik dan orientasi untuk mengimplementasikan “platform” partai ketika calon yang diusungnya memerintah( Almond, 1974: 50-55)

La Palombara dan Weiner (1963: 21-22) mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas partai politik :

1. Organisasi jangka panjang. Organisasi partai politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi.
2. Struktur organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, dan ada pola interaksi yang teratur di antara keduanya. Partai politik kemudian dilihat sebagai organisasi yang meliputi suatu wilayah teritorial serta dikelola secara prosedural dan sistematis.
3. Tujuan berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional.
4. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Dukungan inilah yang menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa.

Carl J. Friedrich (dikutip dari Budiardjo, 2008: 404) mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.

Sedangkan Maurice Duverger (1972: 14) menilai partai politik sebagai suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk

menduduki jabatan-jabatan publik. Dengan demikian yang dimaksud dengan partai politik adalah, sekelompok orang yang terorganisasi dan termotivasi oleh ideologi tertentu dan dibentuk dalam rangka untuk memperjuangkan cita-cita bersama.

Partai politik memiliki sejumlah fungsi- fungsi politik (Almond, 1974: 45-46) yakni;

1. Pertama, fungsi representasi. Fungsi partai politik adalah memberikan sarana politik langsung kepada kepentingan yang diwakilinya, misalnya gereja, petani, buruh, dan sebagainya.
2. Kedua, fungsi konversi dan agregasi, yakni mentransformasi dari apa yang disebut bahan-bahan mentah politik yaitu kepentingan dan tuntutan menjadi kebijaksanaan dan keputusan.
3. Ketiga, fungsi integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi). Sosialisasi adalah proses dimana kumpulan norma-norma sistem politik ditransmisikan kepada orang-orang yang lebih muda. Mobilisasi adalah variasi ekstrem dan sosialisasi, yaitu partai berusaha memasukkan secara cepat sejumlah besar orang yang sebelumnya berada di luar sistem tersebut, juga mereka yang apatis, terasing, tidak tahu menahu, tidak tertarik, takut, ke dalam sistem itu untuk menanamkan kepentingan dan menjamin dukungan massa. Partisipasi berdiri di antara mobilisasi dan sosialisasi, ini berarti bahwa melalui partai di semua sistem, medium ekspresi kepentingan dan partisipasi dalam pemilihan pemimpin dan kebijaksanaan, terbuka untuk semua pihak.
4. Keempat, fungsi persuasi. Fungsi persuasi adalah kegiatan partai yang dikaitkan dengan pembangunan dan pengajuan usul-usul kebijaksanaan agar memperoleh dukungan seluas mungkin bagi kegiatan-kegiatan tersebut.
5. Kelima, fungsi represi. Fungsi represi adalah partai melalui pemerintah atau secara langsung mengenakan sanksi baik kepada anggota maupun bukan anggota, mengendalikan nasib semua asosiasi dan partai lain, serta berusaha menuntut ketaatan dan membentuk pikiran dan loyalitas anggota dengan cara yang tidak hanya tidak mengizinkan adanya oposisi tetapi juga menghukum pihak oposisi dan pembangkang.
6. Keenam, fungsi rekrutmen. Rekrutmen digunakan dalam pengertian yang seluas mungkin untuk menunjukkan latihan dan persiapan untuk kepemimpinan terbuka untuk masyarakat, penampilan badan legislatif, pemerintah atau fungsi-fungsi lain oleh anggota partai, dan tentu saja, kompetisi yang baik dalam pemilihan umum.
7. Ketujuh, fungsi membuat pertimbangan, perumusan kebijakan dan kontrol terhadap pemerintah.
8. Kedelapan, fungsi dukungan. Partai tidak hanya memobilisasi dan memerintah, tetapi juga harus menciptakan kondisi-kondisi bagi kelangsungan hidupnya dan kelangsungan sistem di mana partai tersebut beroperasi.

Fungsi partai politik pada dasarnya memiliki 3 orientasi, pertama, partai politik berperan sebagai pengumpul suara (*voter seeking*). Kedua, menyiapkan kader-kadernya dalam memperebutkan jabatan-jabatan politik (*officer holding*). Ketiga, mengimplementasikan visi dan misi partai jika kadernya terpilih dalam perebutan jabatan politik.

Dalam sejarah perkembangan partai politik paling tidak ada 5 tipologi partai politik. (Krowel, dikutip dari Sigit Pamungkas, 2010: 141-142). Pertama, adalah partai kader. Beragam konsep yang masuk dalam klaster ini sebenarnya berasal dari fenomena yang sama : partai kader yang berstruktur longgar, sangat elit sentris dan dipimpin oleh individu terkemuka, diorganisir dalam kaukus-kaukus tertutup dan kedaerahan dengan organisasi di luar parlemen yang sangat sedikit.

Klaster kedua mengacu pada semua bentuk partai massa. Elemen penentu pada tipe ini yang sering dijadikan acuan adalah mobilisasi massa ekstra parlementer dari kelompok sosial yang secara politis terpinggirkan dengan struktur dan ideologi yang diatur sangat bagus.

Klaster ketiga adalah jenis pencari suara, partai *catch-all*, Partai *catch-all* berasal dari partai massa yang memprofesionalisasi organisasi kepartaiannya dan melakukan penyesuaian ideologi dengan tujuan bisa merangkul pemilih yang lebih luas di luar basis kelas maupun agama tempat mereka berasal.

Jenis keempat adalah partai kartel. Pada dasarnya tipe partai ini bercirikan peleburan partai di kantor publik dengan beberapa kelompok kepentingan yang membentuk kartel politik, dengan tujuan utama mempertahankan kekuasaan eksekutif. Partai ini berbentuk organisasi profesional yang survivalitasnya sangat tergantung pada negara dan secara perlahan mundur dari masyarakat sipil dan membatasi fungsinya hanya sekedar memerintah saja.

Kelima, partai *business-firm*. Tipe partai politik yang mirip firma bisnis ini muncul dari inisiatif peribadi para entrepreneur politik dan sebagian besar memiliki struktur perusahaan komersial. Image pemimpin partai politik, ditambah beberapa isu hangat, dilemparkan ke pasar pemilih yang sangat dinamis melalui sebuah organisasi profesional.

#### 1.4 Metode Pengambilan Informan

Dalam penelitian ini penetapan informan menggunakan teknik *Non Probability Sampling* yakni *purposive sampling*, dimana peneliti menetapkan informan berdasarkan anggapan bahwa informan yang dipilih dapat memberikan informasi yang diinginkan peneliti yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sampel yang diambil didasarkan pada pertimbangan tertentu dari peneliti atas alasan dan tujuan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Eriyanto, 2007: 250).

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

1. Pengurus DPP PDI Perjuangan
2. Pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
3. Pasangan Gubernur terpilih Ganjar Pranowo- Heru Sudjatmiko
4. Ketua Tim Pemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmiko

#### 1.5 Hasil Penelitian dan Temuan

##### 1.5.1 Peran Rekrutmen Bakal Calon Gubernur Jateng

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PDI Perjuangan dan Kebiasaan/Konvensi Partai, mekanisme rekrutmen bakal calon kepala daerah terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian input terdiri atas surat perintah dari Dewan Pimpinan Pusat(DPP) PDI Perjuangan kepada Dewan Pengurus Daerah

(DPD) untuk pemilukada Gubernur dan kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) untuk pemilukada bupati/walikota<sup>1</sup>. Kemudian surat perintah tersebut ditindak lanjuti oleh DPD/DPC PDI Perjuangan berupa kegiatan penjangkaran bakal calon. Bagian proses rekrutmen, biasanya berupa konvensi partai, “fit and proper tes”. Untuk kegiatan konvensi partai, biasanya dilakukan oleh pengurus DPD/DPC dimana pemilukada tersebut berlangsung. Sedang kegiatan “fit and proper test” biasanya dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan. Selanjutnya pada tahap/bagian output, yaitu bagian dimana siapa yang layak untuk dicalonkan dalam pemilukada menjadi kewenangan penuh DPP PDI Perjuangan. Setelah ada putusan siapa yang layak untuk maju dalam pemilukada, maka putusan tersebut (output) dikembalikan kepada pengurus DPD/DPC untuk merealisasikan dalam pemenangan pemilukada.

### 1.5.2 Sistem Rekrutmen Bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jateng 2013

Sistem rekrutmen Bakal Calon Gubernur- Wakil Gubernur Jawa-Tengah 2013 yang dilakukan oleh PDI Perjuangan pada dasarnya mengacu pada tiga hal pokok, yaitu : mengutamakan kader, kapasitas dan loyalitas kepada Partai. Ketiga hal pokok tersebut merupakan pilar untuk mewujudkan cita-cita PDI Perjuangan sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan kepentingan “wong cilik/marhaen”. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka diperlukan adanya seleksi kepemimpinan melalui tiga pilar tersebut. Kader, dianggap sebagai asset utama dan spirit bagi berlangsungnya kehidupan berpartai. Ditangan Kader tersebut, PDI Perjuangan dapat melakukan tugas-tugas dan orientasi politik berupa mengumpulkan suara dalam pemilu (*voting seeker*), mengisi dan memperebutkan jabatan-jabatan politik (*public holder seeker*) maupun memperjuangkan “*visi dan misi*” partai kedalam kehidupan masyarakat ketika berkuasa<sup>2</sup>.

Kapasitas kader sebagai pilar kedua, didasarkan pada pemikiran bahwa pemilukada merupakan peristiwa pemilu, dimana perilaku politik pemilih lebih cenderung memilih “figur” daripada partai/ideology partai. Untuk kepentingan ini, maka PDI Perjuangan senantiasa mengusung kader yang berkualitas, kader yang memiliki kemampuan untuk memimpin, “*ngemong, ngayomi dan nyukupi*” bagi masyarakat yang akan dipimpinya. Untuk keperluan ini, biasanya PDI Perjuangan mengadakan survey internal, untuk memastikan kualitas dan kepemimpinan kader yang akan diusung dalam pemilukada. Survey pemilukada tersebut berkisar pada a) persoalan-persoalan apa saja yang mendesak dan harus segera diatasi; b) criteria-kriteria kepemimpinan seperti apa yang dapat mengatasi persoalan-persoalan mendesak tersebut; c) Siapa-siapa saja yang layak memimpin (sebagai gubernur), dan d) bagaimana kecenderungan-kecenderungan perilaku memilih, terutama factor pesona figure, identitas kepertaian dan politik uang.

Pilar ketiga, Loyalitas Calon. Loyalitas calon biasanya diukur melalui masa pengabdian, jenjang kepengurusan dan sinergisitas dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Masa pengabdian diukur melalui dua kriteria, lama pengabdian dan kualitas pengabdian(cacat/sempurna). Jenjang kepengurusan dilihat pada tiga tingkatan, tingkat nasional, tingkat regional dan tingkat daerah. Sedang sinergisitas dengan DPP PDI Perjuangan, dideskripsikan sebagai pola hubungan yang “*respect dan harmony*”.

Bagaimana mekanisme system rekrutmen bakal calon gubernur-wakil gubernur Jateng dilakukan ?. Pada tahap pertama, PDI Perjuangan melakukan system penjangkaran, yaitu system yang menggunakan pola-pola seleksi terbuka sebagaimana lembaga-lembaga yang ingin memperoleh karyawan/pegawai. Sistem penjangkaran ini

dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa-tengah dengan cara membuka pendaftaran bakal-calon gubernur/wakil gubernur kepada masyarakat luas, terutama masyarakat Jawa-Tengah. Dari kegiatan ini muncul nama-nama: Rustriningsih, Hadi Prabowo, Don Murdono, Djoko Besar Iman, FX. Hadi Rudyatmo, Garin Nugroho, Ganjar Pranowo, Mustofa, Sunarna, Rina Iriani, Heru Sudjatmiko dan sebagainya. Sampai batas yang ditentukan, pendaftaran calon gubernur/wakil gubernur ini berhasil menjaring 26 nama (lihat lampiran 1) dan selanjutnya keduapuluh enam nama tersebut diserahkan DPD PDI Perjuangan Jateng kepada DPP PDIP<sup>3</sup>.

Di tangan DPP PDI Perjuangan keduapuluh enam nama tersebut diuji public melalui survey internal, sehingga muncul 16 nama. Keenambelas nama tersebut kemudian menjalani “fit and proper test” di DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung Jakarta. Selanjutnya, muncul delapan nama yang berhak untuk mengikuti test pada tahap kedua dan terakhir. Kedelapan nama tersebut, Rustriningsih, Hadi Prabowo, Ganjar Pranowo, FX. Hadi Rudyatmo, Heru Soedjatmiko, Sunarna, Don Murdono dan Ikmal. Berdasarkan hasil informasi yang kami peroleh dari lembaga survey yang dipercaya DPP PDI Perjuangan untuk melakukan penelitian elektabilitas, ternyata Rustriningsih menduduki peringkat pertama, Hadi Prabowo peringkat kedua dan Ganjar Pranowo peringkat ketiga untuk jabatan calon Gubernur. Untuk calon wakil gubernur, muncul FX. Hadi Rudyatmo, Garin Nugroho dan Rina Iriani. Namun, pada akhirnya DPP PDI perjuangan merestui dan mendukung Ganjar Pranowo- Heru Sudjatmiko sebagai calon Gubernur-wakil gubernur Jateng pada pemilukada 2013. Munculnya nama Ganjar-Heru ini dalam pemilukada Jawa-tengah, menandai berakhirnya karir politik Rustriningsih di arena PDI Perjuangan dan memperkuat citra PDIP sebagai partai kader dengan tersingkirnya Hadi Prabowo dalam bursa calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan.

### 1.5.3 Fungsi Politik PDI Perjuangan.

Melihat system rekrutmen bakal calon gubernur-wakil gubernur Jateng seperti di atas, fungsi-fungsi politik PDI Perjuangan tampaknya dijalankan secara sentralistik oleh lembaga yang bernama DPP PDI Perjuangan yang ada di Jakarta. Sedang DPD PDI Perjuangan Jateng, hanya menjalankan fungsi administrative-normatif, yaitu membuat surat keputusan (SK) yang menetapkan pasangan Ganjar Pranowo- Heru ke KPU Jawa-Tengah, sebagai calon gubernur-wakil gubernur dalam pemilukada Jateng 2013 yang lalu. Adapun substansi dari isi keputusan tersebut semuanya berasal dari perintah maupun restu DPP PDI Perjuangan. Padahal, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan mengusulkan atau menetapkan pasangan calon kepala daerah berada dikepengurusan daerah. DPD Provinsi untuk calon gubernur-wakil gubernur, DPC/DPD Kabupaten/Kota untuk calon bupati-wakil bupati atau calon walikota-wakil walikota. Menanggapi fenomena seperti di atas, salah seorang fungsionaris DPD PDI Perjuangan Jawa-Tengah menyatakan bahwa PDI Perjuangan dalam menjalankan fungsi-fungsi politik senantiasa menjunjung nilai-nilai gotong royong, musyawarah-mufakat dan senantiasa taat pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai. DPD PDI Perjuangan Jateng merasa sudah dilibatkan dan “*diwongke*”, maka keputusan DPP PDI Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmiko merupakan keputusan partai, maka keputusan tersebut harus didukung penuh oleh jajaran partai di wilayah Jawa-Tengah. Untuk menunjang dan mensosialisasikan pasangan ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati memerintahkan semua pengurus partai di semua tingkatan, para pimpinan /anggota DPRD dan para kepala daerah/wakil kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan untuk ikut mendukung pencalonan Ganjar-Heru. Bagi mereka yang tidak loyal, mereka akan dikenai sanksi tegas, seperti yang dialami oleh Don Murdono

berupa pemecatan, karena dianggap mbalelo dengan tetap maju pada pencalonan gubernur yang berpasangan dengan Hadi Prabowo-Don Murdono. Demikian halnya, Rustriningsih, memperoleh sanksi social berupa diisolasi dari semua kegiatan partai. Dengan demikian fungsi-fungsi politik kepartaian termasuk didalamnya fungsi rekrutmen kepala daerah, sepenuhnya dijalankan oleh elite partai yang bernama DPP PDI Perjuangan. Kepengurusan partai yang ada ditingkat Provinsi (DPD PDI Perjuangan) dan ditingkat Kabupaten/Kota (DPC PDI Perjuangan) hampir tidak memiliki fungsi-fungsi politik, kewenangan pengurus daerah adalah kewenangan administrative, kewenangan yang hanya sebatas menjalankan perintah dan meminta petunjuk dari DPP PDI Perjuangan.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana model pengambilan keputusan di DPP PDI Perjuangan, apakah melalui mekanisme organisasi modern atau melalui kebajikan seorang tokoh. Berdasarkan hasil pengamatan melalui pernyataan-pernyataan beberapa tokoh di media cetak maupun media elektronik, proses pengambilan keputusan dalam proses rekrutmen kepala daerah pada pemilukada Jateng 2013, mengindikasikan bahwa kedaulatan keputusan ada ditangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Menanggapi fenomena seperti ini fungsionaris DPP dan DPD PDI Perjuangan Jateng menyatakan bahwa PDI Perjuangan itu partai yang bersendikan gotong royong, nasionalisme dan taat kepada pemimpin, terutama kepada Megawati soekarno Putra. Megawati dihadapan pengurus partai masih dianggap sebagai “Primus interparis”.

Melihat model/pola rekrutmen politik yang sentralistik ini maka tipologi kepartaian PDI Perjuangan dalam kategori Krouwel, termasuk tipologi partai antara partai kader dan partai massa. Termasuk dalam kategori partai kader, karena kepengurusan PDI Perjuangan dipimpin oleh tokoh yang sangat berpengaruh dan diorganisasikan secara tertutup melalui mekanisme “mohon petunjuk/tergantung” dan kartel tertutup/keluarga Bung Karno.

Model rekrutmen politik seperti di atas, yaitu menggunakan mobilisasi massa dan digerakkan oleh kelompok social (marhen) yang secara politis memiliki ideology yang kuat, yaitu ideology nasionalisme dan Tri Sula Bung Karno, maka PDI Perjuangan terutama di Jawa-Tengah termasuk tipologi partai masa. Fenomena ini diperkuat oleh adanya anggapan bahwa Provinsi Jawa-Tengah merupakan basis “banteng” dan memang secara politik PDI Perjuangan selalu menang di Jawa-Tengah.

#### **1.5.4 Mengapa Ganjar Pranowo bukan Rustriningsih?.**

Hasil atau keluaran dari sebuah proses rekrutmen politik adalah terpilihnya kader untuk diusung dalam pemilukada. Seperti diketahui dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah di Jawa Tengah, telah muncul tiga nama yang paling banyak menghiasi berbagai media massa dan perhatian dari pengamat politik. Ketiga nama tersebut adalah Rustriningsih (kader PDI Perjuangan/Wakil Gubernur), Hadi Prabowo (Sekda Provinsi Jateng, non kader) dan pendatang baru Ganjar Pranowo (kader PDI Perjuangan/Anggota DPR RI). Tingkat electabilitas pada saat pencalonan, Rustriningsih menduduki peringkat pertama, kemudian disusul Hadi Prabowo dan sebagai juru kunci Ganjar Pranowo (Lihat lampiran 2). Rustriningsih yang merupakan kader PDI Perjuangan pada masa sebelumnya pernah menjadi Bupati Kebumen 2 kali periode dan pada masa pemilihan gubernur jawa tengah tahun 2008, merupakan “figure yang mempesona”, sehingga pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih yang diusung PDI

Perjuangan dapat memenangi Pilgub Jateng 2008. Namun persoalannya mengapa Rustriningsih tidak lolos dalam seleksi penjaringan calon gubernur Jateng 2013?. Dari berbagai sumber yang diperoleh (lihat lampiran transkrip wawancara dengan Fungsiaris DPP PDIP, Fungsiaris DPD PDIP, tim sukses Hadi Prabowo dan aktivis PDIP Jateng), kualitas kepemimpinan Rustriningsih disangsikan oleh elite partai baik ditingkat DPD maupun DPP. Pada tingkat DPD PDI Perjuangan Jawa-Tengah, Rustriningsih telah dimatikan oleh Murdoko (Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng), yaitu tidak diberi tempat pada kepengurusan DPD pasca Musda 2008. Sedang pada pemerintahan provinsi Jawa-Tengah, peranan sebagai Wakil Gubernur telah dikunci oleh Bibit Waluyo. Sedang hubungan sinergitas Rustriningsih dengan Ibu Megawati juga mengalami hambatan, terutama ketika Ia bersedia menjadi pengurus Ormas Nasdem Jawa Tengah. Perilaku Rustriningsih seperti ini, dianggap oleh kalangan elite PDI Perjuangan sebagai tindakan pembelotan, meskipun akhirnya mengundurkan diri.

Berbeda dengan Ganjar Pranowo. Aktivitas dan pergerakannya senantiasa memperoleh dukungan dari elite PDI Perjuangan, terutama Puan Maharani. Meskipun Ganjar, masih termasuk kader muda dan pinggiran, tetapi sepak terjang dan kemampuan orasinya dapat sinergi dengan elite PDI Perjuangan disatu pihak, dan dipihak lain terjadi kekosongan kepemimpinan DPD PDI Perjuangan pasca ditahannya Murdoko oleh KPK.

Sedang Hadi Prabowo banyak dijagokan akan lolos pada proses rekrutmen karena kapasitasnya sebagai sekretaris daerah Jawa-Tengah. Ia dianggap sukses sebagai sekda bahkan dianggap sebagai *“the real governour”*. Disamping factor kapasitasnya sebagai sekda, Hadi Prabowo dikenal sebagai birokrat yang mumpuni secara materi.

Dari informasi yang kami peroleh (lihat lampiran 3), munculnya Ganjar Pranowo sebagai calon gubernur disebabkan oleh factor loyalitas, sinergisitas dan kepentingan pucuk pimpinan partai Loyalitas Ganjar Pranowo tampaknya lebih kuat jika dibandingkan dengan Rustriningsih, apalagi Hadi Prabowo. Sedang sinergisitas sering dimaknai dapat “nyambung”relasinya dengan kepemimpinan DPP, dan kepentingan pucuk pimpinan partai adalah kepentingan dalam memenangkan Pilpres 2014. Dengan demikian, tersingkirnya Hadi Prabowo dalam bursa calon gubernur versi PDI Perjuangan, memperkuat dugaan bahwa PDI Perjuangan tidak mau kecolongan yang kedua kali, seperti ketika mendukung Bibit Waluyo-Rustriningsih pada Pilgub Jateng 2008 yang lalu. Hampir semua sumber yang kami dapat mengiyakan sinyalemen ini, dengan alasan Hadi Prabowo bukan kader PDI Perjuangan.

Fenomena munculnya Ganjar Pranowo –Heru Sudjatmiko pada Pilgub Jateng 2013, dapat dimaknai sebagai berikut: Kriteria sebagai kader, ternyata criteria yang tertutup dan menjadi “hak mutlak” DPP PDI Perjuangan terutama Megawati Sukarno Puteri. Dalam praktek politik sehari-hari, system pengkaderan dan criteria kader ternyata tergantung dari “kebajikan “ pengurus DPP PDI Perjuangan. Demikian halnya, mengenai kapasitas kader. Meskipun selama pemilukada 2012-2013, kapasitas kader yang direstui oleh DPP PDI Perjuangan dalam Pemilukada mengalami kemajuan, tetapi ukurannya masih tetap samar-samar. Untuk Pemilu kada Gubernur Jawa-Tengah 2013, kapasitas Ganjar Pranowo ada dibawah Rustriningsih, namun yang lolos tetap Ganjar Pranowo. Demikian halnya masalah loyalitas, ternyata ukuran loyalitas dalam prakteknya adalah adanya hubungan yang harmonis yang nengacu pada loyalitas personal, terutama loyalitas kepada DPP PDI Perjuangan.

Singkat kata, praktek system rekrutmen PDI Perjuangan pada pemilukada Gubernur Jateng 2013, mengarah pada model semi tertutup, sentralistik, dan sifat keputusannya bersifat personal. Dengan demikian PDI

Perjuangan belum menunjukkan perilaku politik yang demokratis, baik dari sisi kelembagaan maupun sisi perilaku elit politiknya. Terlepas dari kemenangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmiko dalam pemilukada Gubernur Jateng 2013, system rekrutmen bakal calon gubernur-wakil gubernur Jateng, menyisakan pertanyaan fundamental . Sudah siapkah PDI Perjuangan menjadi partai modern, kawah candradimuka bagi kepemimpinan politik Indonesia yang demokratis.

## 1.6 Peran /Fungsi Pemenangan/Pengumpul Suara

### 1.6.1 Peran Sebagai Perencana Konseptual

Peran sebagai perencana konseptual berkaitan dengan perumusan Visi dan Misi, Tim Sukses, dan Strategi Politik. Makna Visi secara harafiah adalah suatu pandangan kedepan dan tujuan-tujuan utama sebuah organisasi/gerakan yang ingin dicapai selama periode tertentu. Visi yang dibuat harus mampu mempresentasikan mengenai hal-hal apa saja yang ingin diperjuangkan, sehingga visi tersebut mampu menarik simpati pemilih. Untuk keperluan ini, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) menugaskan Puan Maharani, salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI sebagai Komandan Tempur/Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Heru. Berdasarkan pengakuan Ganjar Pranowo 1) (lihat lampiran 1, transkrip wawancara dengan Ganjar Pranowo, 30 Maret 2013), lahirnya Visi “Menuju Jawa-Tengah Sejahtera Dan Mandiri” dan Taqline “Mboten Korupsi Dan Mboten Ngapusi”, merupakan hasil keprihatinan bersama mengenai keadaan Jawa-Tengah dimana pendanaan APBD selama 5 Tahun Terakhir masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Dan pola ketergantungan kepada pemerintah pusat ini, diperparah oleh model kepemimpinan Gubernur Bibit Waluyo yang kontraversial dan melupakan jasa PDI Perjuangan sebagai partai pengusung tatkala berkompetisi pada Pilgub Jateng 2008 yang lalu. Keadaan kepemimpinan tersebut maka lahirlah taqline “*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”.

Sedang pengertian Misi, adalah segala bentuk usaha, perbuatan yang harus dilakukan agar Visi yang telah dibuat dapat terwujud. Ada 7 misi yang ditawarkan oleh pasangan Ganjar-Heru, yaitu :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dibidang kebudayaan.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan “*mboten korupsi, mboten ngapusi*”.
4. Memperkuat kelembagaan social masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajad hidup orang banyak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sedang mengenai pengorganisasian, DPP PDI Perjuangan, membentuk organisasi model komando. Pemegang komando tertinggi Ibu Megawati Soekarno Puteri, Komandan Tempurnya Puan Maharani, dengan

membawahi komandan lapangan (Dapil) yang dipimpin oleh fungsionaris DPP yang maju sebagai anggota DPR RI wilayah Jawa Tengah. Komandan Tempur tersebut dibantu oleh unsur staf, yaitu sekretaris, bendahara dan tim Ahli. (Wawancara dengan salah seorang Tim Ahli, bernama Wd, 12 Maret 2014).

DPP PDI Perjuangan sebagai pemegang penuh kendali pencalonan Ganjar-Heru, juga merumuskan Strategi Politik pemenangan Ganjar-Heru. (Wawancara dengan Tim ahli Wd., dan anggota Tim Garuda bernama AB, 2 Pebruari 2014), yang terdiri dari Strategi Kampanye Politik, Strategi Penonjolan Figur, Strategi Basis Massa, Strategi Testimonial (Membawa Kader PDI Perjuangan lain Yang Populer), Strategi Pendekatan Komunitas (Komunitas Tembakau, Komunitas Petani/Nelayan, Komunitas Media Sosial).

### **1.6.2 Peran Sebagai Mesin Politik Pengumpul Suara.**

Peran sebagai mesin pengumpul suara, DPP PDI Perjuangan, menggandeng Jaringan Survey Indonesia (JSI) untuk melakukan survey internal mengenai kekuatan dan kelemahan pasangan Ganjar- Heru dan memetakan kecenderungan perilaku memilih masyarakat Jawa Tengah. Ada hal yang menarik mengenai peran atau fungsi DPP PDI Perjuangan sebagai mesin pengumpul suara, yaitu minimnya dana yang dimiliki oleh Tim Pemenangan dan kemampuan ekonomi calon Gubernur Ganjar Pranowo dan Calon wakil gubernur Heru Sudjatmoko (wawancara dengan Tim Ahli Wd., dan komandan dapur umum JB, 20 January 2014). Untuk menyikapi masalah minimnya dana pemenangan ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Puteri menginstruksikan Kader PDI Perjuangan yang duduk dipemerintahan untuk ber gotong royong memberikan bantuan berbentuk uang tunai kepada Tim Pemenangan yang dikomandani oleh Puan Maharani. Dana ini dipakai dalam rangka untuk kampanye terbuka, yang bisa dihadiri oleh ribuan massa, sehingga memiliki dampak bagi pemilih terutama pemilih yang belum menentukan pilihannya.

Berbarengan dengan minimnya dana pemenangan, DPP PDI Perjuangan mengerahkan kader PDI Perjuangan lain yang dianggap populer , seperti Rike Dyah Pitaloka (Oneng), Rano Karno, Jokowi dan tentu juga penonjolan Figur Ganjar Pranowo sebagai figure anak muda yang cerdas,energik sehingga cocok untuk memimpin Provinsi Jawa-tengah 5 tahun kedepan. Penonjolan Figur Ganjar tersebut, diperkuat dengan gaya komunikasi yang yang baik dan mengena terutama dari kalangan anak muda.

Hal lain yang didorong oleh mesin DPP PDI Perjuangan adalah melakukan pendekatan kampanye yang berlandaskan basis massa PDI Perjuangan, yaitu Soekarnoisme yang berbentuk ajaran Tri Sakti Bung Karno. Strategi ini didasari adanya klaim bahwa Jawa Tengah adalah basis banteng baik sejak pemilu 1955 dan era reformasi ini. Figur Ganjar yang kader tulen PDI Perjuangan dan masyarakat pemilih yang ada “romantisme Soekarno”, membuat mesin PDI Perjuangan hidup dan sinergi dengan masyarakat pemilihnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Almond, Gabriel (ed.), *Comparative Politics Today*, 1974, Boston: Little, Brown & Co.)
- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Duverger, Maurice, 1972, *Party Politics and Pressure Groups*, New York: Thomas Cromwell.
- Eriyanto. 2007. *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*, LKIS.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik*, Yayasan Obor.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Mengelola Partai Politik*, Yayasan Obor.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik*, Yayasan Obor.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*, Kencana.
- Held, David. 2006. *Model of Democracy*, Akbar Tandung Institute.
- La Palambora, J. (ed.), 1963, *Bureaucracy and Political development*, Princeton: Princeton University Press.
- Marijan, Kacung. 2006. *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran Pilkada Secara Langsung*, Pustaka Eureka.
- Moelong, Lexi J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya.
- Neuman, W. Lawrence. 1997. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*. Allyn and Bacon.
- Nimmo, Dan. 2001. *Komunikasi Politik, khalayak dan Efek*. PT Remaja Rosdakarya.
- Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (ed). 2005. *The Sage Handbook Of Qualitative Research 3<sup>rd</sup> edition*, Sage Publication.
- Pamungkas, Sigit. 2010. *Pemilu Perilaku Pemilih & Kepartaian*, Insitute for Democracy and Welfare
- Prihatmoko, Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP2I Press.
- Sastroatmojo, Sudjono. 1995. *Perilaku Politik*, Ikip Semarang Press.
- Setiawan, Bambang (ed). 2004. *Partai-Partai Politik Indonesia. Ideologi dan Program*, Kompas.
- Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi, Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang berkembang*, Pustaka Pelajar..
- Surbakti, Ramlan. 2000. *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasendo.
- Syaukani, dkk. 2005. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar.
- Urbaningrum, Anas. 2004. *Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid*. Republika.

Lampiran :Transkrip Hasil Wawancara

**N a m a** : NN

**Jabatan** : Fungsionaris DPD PDI Perjuangan

**Hari/ Tanggal** : 11 September 2013

**Pertanyaan** : Bagaimana peran DPD PDI Perjuangan Jateng dalam pencalonan Gubernur pada Pilgub Jateng yang lalu ?.

**Jawab**: DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, menunggu perintah dari DPP PDI Perjuangan. Mekanismenya, kami mengirim surat ke DPP PDI Perjuangan, bahwa tahapan pemilihan Gubernur Jateng segera dimulai. Setelah ada perintah dan petunjuk dari Pusat, kemudian kami yang ada di daerah segera melaksanakan perintah tersebut.

**Pertanyaan** : Apa dan bagaimana isi perintah dari DPP PDI Perjuangan ?

**Jawab**: Isinya antara lain berisi, tentang konsolidasi kader/partai untuk memenangkan pilgub jateng 2013. Selain itu ada perintah untuk melakukan kegiatan berupa kegiatan penjaringan bakal calon gubernur-dan wakil gubernur Jateng. Perintah ini kemudian kami tindak lanjuti dengan kegiatan penjaringan calon.

**Pertanyaan**: Siapa-siapa saja yang mendaftar dalam proses penjaringan tersebut?.

**Jawab**: Pada dasarnya ada tiga kelompok yang daftar, kelompok kader, kelompok birokrat dan tokoh masyarakat atau tokoh lintas partai.

**Pertanyaan**: Kenapa Pak Bibit Waluyo nggak ikut daftar?.

**Jawab**: Wah kalau yang satu ini, kami nggak ngerti, coba anda tanyakan sendiri sama yang bersangkutan. Tapi kan akhirnya , Pak Bibit Waluyo diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional.

**Pertanyaan**: Kembali kepada persoalan proses penjaringan. Apa kewenangan DPD PDI Perjuangan dalam proses penjaringan tersebut?. Apakah sekedar melakukan pendaftaran atau memiliki kewenangan untuk merekomendasikan nama-nama yang muncul atau diberi wewenang untuk melakukan “fit & proper test” ?.

**Jawab**: Ya, kegiatan ini adalah kegiatan gotong royong, sesuai dengan jiwa partai kami. DPP senantiasa mendorong kami (DPD) untuk senantiasa memberikan informasi-informasi yang akurat dan bermanfaat bagi partai. Dan amanah itu telah kami lakukan, dan kami diapresiasi oleh DPP. Bagi kami, apa yang amanahkan oleh DPP merupakan kehormatan kami. Toh yg diputuskan DPP, akhirnya menang.

**Transkrip Hasil Wawancara****N a m a : TL****Jabatan : Fungsionaris DPP PDI Perjuangan****Hari/Tanggal: 23 Agustus 2013 (Pelantikan Gubernur Ganjar Pranowo)**

**Pertanyaan : Bagaimana sebenarnya kebijakan DPP PDI Perjuangan dalam proses pencalonan kepala daerah selama ini ?.**

**Jawab : Secara garis besar, kebijakan pencalonan kepala daerah, menjadi wewenang DPP. Tapi dalam pelaksanaannya kami mempercayakan proses penjaringan dan pencalonan itu kepada pengurus daerah. Bahkan dalam menentukan siapa calon yang layak, tidak jarang DPP meminta pendapat dan informasi mengenai calon yang layak dicalonkan.**

**Pertanyaan: Apakah DPP selama ini dalam melakukan proses penjaringan dan terutama dalam mekanismenya ada pola-pola baku dalam proses penjaringan ?.**

**Jawab : Polanya, Pengurus Daerah memberitahu DPP bahwa didaerahnya akan ada pemilukada. Kemudian DPP memberi arahan dan perintah untuk segera melakukan proses penjaringan dan pencalonan. Hasil dari penjaringan, kemudian dikirim ke DPP untuk dibahas, diteliti. Kesemuanya ini adalah untuk kepentingan partai dan kemenangan di pemilukada.**

**Pertanyaan : Apa saja materi dari “fit and proper test” calon kepala daerah itu?.**

**Jawab : Ya berkaitan dengan integritas, kapasitas dan loyalitas kepada partai. Singkatnya, untuk memperoleh kader terbaik, bagi partai bagi masyarakat pemilihnya. Dan PDI Perjuangan selalu mengutamakan kader sendiri.**

**Pertanyaan : Apa sebenarnya criteria kader PDI Perjuangan ?.**

**Jawab : Ya, seperti yang sering ditulis di media, bisa ngayomi, ngayemi dan nyenengke. Artinya mereka yang dianggap kader PDI perjuangan adalah mereka yang semangatnya, karakteristiknya dan cita-citanya adalah seperti cita-cita NKRI.**

**Pertanyaan : Bu Rustriningsih itu, termasuk criteria kader atau tidak ?.**

**Jawab : Ah, janganlah bicara yang itu. Semua orang tahu, sepak terjang Bu Rustri selama ini. Ia tokoh perempuan yang paling menonjol di Jawa Tengah. Tapi DPP, punya perhitungan sendiri, toh akhirnya yang dipilih DPP memperoleh kemenangan yang meyakinkan di pilgub Jateng 2013.**

**Pertanyaan : Jadi peran DPP yang dominan dalam penentuan siapa yang dianggap layak dalam pencalonan kepala daerah selama ini, sudah tepat?**

Jawab : Kami selalu luwes dan mengajak pengurus daerah untuk senantiasa guyub, gotong royong. Nilai-nilai itu merupakan nilai-nilai luhur kami yang senantiasa kami pelihara.

Pertanyaan : Jadi sebenarnya, DPP itu sudah memiliki tim untuk melakukan uji integritas, kapasitas dan loyalitas kader ?.

Jawab : Ya, sebagai partai besar dan punya karakter ideology, masak nggak punya tim dan fungsi rekrutmen.

Transkrip Wawancara

N a m a : TY

Jabatan: Tim Ahli Hadi Prabowo

Hari/Tanggal: 12 Juli 2013

---

Pertanyaan : Kenapa Pak Hadi Prabowo ikut proses penjarangan di PDI Perjuangan ?

Jawab : Ya, karena PDIP adalah partai yang punya masa loyal, dan Jawa Tengah kan basis merah, basis PDIP. Disamping itu hubungan antara Pak HP (Hadi Prabowo) dan Bu Mega kan sudah terjalin lama. Pak HP kan aktivis GMNI, ketika kuliah di FISIP Undip Semarang.

Pertanyaan : Kenapa Pak Hadi Prabowo, masih ngotot lewat PDIP sampai detik-detik terakhir ?.

Jawab : Ya, karena yakin akan relasinya dan kapasitas Pak HP sebagai Sekda yang powerfull.

Pertanyaan : Bagaimana akhirnya, Pak Hadi Prabowo tidak lolos ?.

Jawab : Wah, itu diluar dugaan. Dan akhirnya Pak Hadi kan tetap maju, dan dapat perahu.

Pertanyaan : Sebenarnya siapa yang paling berperan dalam menentukan lolos tidaknya calon KDH?. DPP atau DPD ?.

Jawab : Menurut perkiraan saya, secara kelembagaan ya DPP. DPD PDIP Jateng hanya menjalankan fungsi administrative belaka. Dan kalau dirunut keatas, yang Ibu Megawati itu penentu utama lolos-tidaknya calon kepala daerah. Ibu Megawati itu, primus interparisnya PDIP. Megawati ya PDIP, PDIP ya Megawati.

Pertanyaan : Kenapa Pak HP tetap ngotot nyalon gubernur, meski tak lolos di PDIP ?

Jawab : Aduh, ya mungkin karena harga diri atau rasa percaya diri yang melekat pada Pak HP. Sebaiknya anda tanyakan saja sama Pak HP saja.

Pertanyaan : Akhirnya Pak HP Kalah, apakah merasa ditipu oleh koalisi partai pendukungnya ?.

**Jawab :** Yang pasti kecewa, tapi detailnya tanyakan saja pada Pak HP ya. Saya sebenarnya sudah merasa, kalo Pak HP bakal kalah, karena setiap pertemuan/kampanye yang hadir tidak sesuai yang dlaporkan oleh partai pengusungnya. Mungkin belum sinergi dengan partainya. Ya itulah pemelukada.

**Pertanyaan :** Setelah kalah dalam Pilgub Jateng, akan kemana kira-kira Pak HP berkiprah ?.

**Jawab :** Aduh , sebaiknya ditanyakan saja sama Pak HP sendiri.